

PENGARUH TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA BANDUNG PERIODE 2008 s.d. 2017

Eko Purwanto¹, Sunardi Rohman²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
email : ekopurwanto@unibi.ac.id, ardiakuntansi2015@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, yang mana di dalam periode tersebut terdapat sebuah masalah yang menarik perhatian untuk diteliti yaitu tingkat inflasi yang mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2013 dan 2014 dan penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target di tahun 2009, 2016 dan 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah data mengenai tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017 dengan teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau biasa disebut teknik sensus. Hasil yang diperoleh dari uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, karena berdasarkan perhitungan uji hipotesis melalui uji t tersebut, diperoleh nilai signifikansi $0,767 > 0,05$ dan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,307 \leq 2,36462$). Pengujian regresi linier sederhana didapatkan persamaan $Y = 115,966 + 1,386X + 0,05$. Pengujian korelasi pearson diperoleh angka 0,108 artinya hubungan antara variabel tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017 sangat rendah karena berada dalam interval 0,00 - 0,199. Pengujian koefisien determinasi diperoleh angka 0,012 atau 1,2%, artinya variabel tingkat inflasi mempunyai pengaruh sebesar 1,2% saja atas perubahan yang terjadi terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak Daerah

Abstract

This research was conducted to determine how much the level influence of inflation rate on local tax revenues in Bandung City period 2008 until 2017, which in that period there was an interesting problem to examine that the inflation rate have a substantial increase in 2013 and 2014 and for local tax revenues that did not reach the targets in 2009, 2016 and 2017. Population in this research is data on the inflation rate and local tax revenues in Bandung City period 2008 until 2017 with sampling technique that used is a saturated sampling or usually caled cencus technique (nonprobablity sampling).

The results of the t test is shows that the inflation rate does not have a significant effect on local tax revenues in Bandung City period 2008 until 2017, because based on the result of hyphothesis testing through the t test, a significance value of $0,767 > 0,05$ and $t_{count} \leq t_{table}$ ($0,307 \leq 2,36462$) is obtained. The test of simple linear regression shows the equation that $Y = 115,966 + 1,386X + 0,05$. Pearson correlation test obtained the number 0,108, it mean the relationship between the variable of inflation rate on local tax revenue in Bandung City period 2008 until 2017 is very low because it is in the interval 0,00-0,199. Determination coefficient test obtained the number 0,012 or 12%, it mean that the variable of inflation rate has an influence only 1,2% for changes on local tax revenues.

Keywords: Compliance of Individual Taxpayers, e-filing, understanding of taxation, awareness of taxpayers.

1. PENDAHULUAN

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi yang diketahui oleh masyarakat pada saat ini adalah angka inflasi yang dihitung berdasarkan suatu angka indeks, atau disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka indeks ini disusun berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (price level). Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi (Indriyani, 2016:2).

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia akan diikuti seiring dengan perkembangan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dalam pengertian umum adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Prasetyono, 2012:8).

Menurut pasal 1 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan wewenang, hak serta kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan atau masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Setiap daerah harus menyejahterakan masyarakatnya melalui berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan upaya pemerataan pembangunan. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pembangunan di masyarakat Indonesia, memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana tersebut tidak lain diperoleh dari sektor perpajakan, baik pajak negara maupun pajak daerah

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi dan penerimaan pajak merupakan dua hal yang berbeda yang sampai saat ini masih menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti dan menjadi topik perbincangan yang tidak ada habisnya diseluruh dunia. Inflasi yang menjadi variabel "X" dalam penelitian ini adalah variabel independen atau variabel bebas yang diambil oleh penulis sebagai variabel yang nantinya akan diteliti pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah yang menjadi variabel "Y" atau variabel dependen atau yang dikenal sebagai variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat, maka dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yang diteliti yaitu mengenai tingkat inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (price level). Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Adapun yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun (Indriyani, 2016:2).

Sugiyono (2017:39), mengatakan bahwa variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka dalam penelitian ini hanya ada satu variabel dependen yakni penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat

timbang balik secara langsung (Siahaan, 2013:175).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan inflasi agar tetap dalam taraf rendah atau tetap terkontrol. Salah satu upaya tersebut adalah kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting di dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki (Sukirno, 2015:187).

H_a : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung Periode 2008-2017.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data mengenai tingkat inflasi di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017 dan data mengenai penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dengan periode yang sama yaitu periode 2008 s.d. 2017.

Teknik pengambilan sampling di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sering disebut juga dengan sensus. Teknik sampling ini termasuk ke dalam teknik nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2017:84), nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sedangkan yang dimaksud dengan teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017:85). Berdasarkan penjelasan diatas, maka sampel yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini

adalah seluruh dari anggota populasi, yaitu data mengenai tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. periode 2017.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang digunakan di dalam sebuah penelitian untuk menganalisis sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, serta memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga macam yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.2.2. Koefisien Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi pada dasarnya merupakan suatu studi untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis. Penelitian yang menggunakan analisis regresi linier sederhana adalah penelitian untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2016:204).

Metode regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dengan persamaan umum regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Daerah

a : Nilai Konstanta

b : Koefisien regresi yaitu perubahan pada Y jika X berubah satuan.

X : Tingkat Inflasi

e : Tingkat kesalahan (*Error* 5%)

3.2.3. Koefisien Korelasi (*Least Square*)

Kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi (Sugiyono, 2017:228), maka dari itu analisis korelasi di dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur apakah terdapat hubungan yang kuat antara tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.

3.2.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan model kuat atau lemah. Kelemahan mendasar menggunakan R^2 adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 pasti akan meningkat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan menggunakan nilai Adjusted R^2 dalam mengevaluasi model regresi.

Persamaan regresi yang diperoleh dari suatu proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat (Y), sehingga diperlukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien Determinasi (KD) dapat dihitung dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi

3.2.5. Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2017:159-160), mengatakan bahwa uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kebenaran dari dugaan sementara. Hipotesis pada dasarnya diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol.

Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dan statistik (data sampel). Hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji t. Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti terbagi kedalam tiga tahapan yakni: uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokoreasi. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penulis melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi. Metode analisis statistik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan IBM SPSS Versi 24.

4.1.2. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas atau independen (X) terhadap satu variabel terikat atau dependen (Y). Berikut hasil penelitian dari uji regresi linier sederhana dengan menggunakan IBM SPSS Versi 24.

Tabel 4.1. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	115,966	25,260		4,591	0,002
	Tingkat Inflasi	1,386	4,514	0,108	0,307	0,767

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS Versi 24

4.1.3. Uji Korelasi

Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Semakin besar nilai koefisien korelasinya maka akan semakin besar juga interpretasi

tingkat hubungannya. Penulis menggunakan uji korelasi pearson di dalam melakukan penelitian ini. Berikut hasil pengujian menggunakan uji korelasi pearson.

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi Berganda
Correlations

		Tingkat Inflasi	Penerimaan Pajak Daerah
Tingkat Inflasi	Pearson Correlation	1	0,108
	Sig. (2-tailed)		0,767
	N	10	10
Penerimaan Pajak Daerah	Pearson Correlation	0,108	1
	Sig. (2-tailed)	0,767	
	N	10	10

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS Versi 24

Tabel di atas menunjukkan hasil dari pengujian korelasi pearson yang memberikan informasi bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat inflasi di Kota Bandung dengan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017. Hal ini disebabkan karena hasil perolehan uji korelasi pearson yang didapatkan sebesar 0,108, yang artinya berdasarkan interpretasi tingkat hubungan mengenai kuat atau rendahnya

hubungan yang sudah dibahas sebelumnya (Tabel 3.4), maka hubungan antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sangat rendah, karena angka 0,108 berada di dalam interval antara 0,00 – 0,199, yang artinya hampir tidak ada korelasi antara tingkat inflasi di Kota Bandung dengan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.

4.1.4. Uji Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (tingkat inflasi) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak daerah). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan

oleh penulis dengan menggunakan IBM SPSS Versi 24, maka dapat diperoleh nilai *R Square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi (R₂)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,108 ^a	0,012	-0,112	36,72503

a. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS Versi 24**4.1.5. Uji Hipotesis**

Metode pengambilan keputusan di dalam pengujian hipotesis ini didasarkan dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Pengujian hipotesis didalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) melalui IBM SPSS Versi 24 dengan dasar pengambilan keputusan taraf signifikansi 5%.

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t juga bertujuan untuk menguji signifikansi nilai parameter hasil regresi serta melihat kecocokkan tanda atau hubungan positif atau negatif antara hipotesis alternatif dan hasil pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan *standard error* 5% dengan $df = n-k-1$.

Berikut kriteria yang digunakan penulis di dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial).

1. H_a: Variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.
2. H_o: Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.

Kriteria uji t yang akan dilakukan adalah:

1. Bila t hitung lebih besar atau sama dengan nilai t tabel, maka H_o ditolak dan H_a diterima.
2. Bila t hitung lebih kecil atau sama dengan nilai t tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, berikut hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t.

Tabel 4.4 Hasil Uji t (parsial)**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	115,966	25,260		4,591	0,002
	Tingkat Inflasi	1,386	4,514	0,108	0,307	0,767

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS Versi 24

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,307.

Nilai Degree of Freedom (DF) yang sudah dihitung akan disesuaikan dengan nilai t_{tabel} , dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga

diperoleh nilai dari t_{tabel} adalah sebesar 2,36462. Dengan demikian didapatkan bahwa $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ ($0,307 \leq 2,36462$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel

4.1.6. Pembahasan Penelitian

Pembahasan penelitian berdasarkan beberapa tahapan pengujian data yang telah dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017. Hal ini didasarkan pada pengujian signifikansi yang telah dilakukan pada pengujian hipotesis melalui uji t dalam penelitian ini, didapatkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 5% ($0,767 > 0,05$), dan berdasarkan perhitungan t hitung yang dibandingkan dengan t tabel diperoleh $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ ($0,307 \leq 2,36462$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, karena berbicara mengenai inflasi berarti berbicara mengenai kondisi perekonomian secara makro dan berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dialami oleh suatu negara dan akan berkenaan dengan penerimaan pajak pada negara tersebut. Sukirno (2015:9), menjelaskan bahwa selain inflasi, ada hal lain yang menyebabkan masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi oleh suatu negara dan berlangsung dalam jangka panjang, masalah-masalah tersebut adalah:

1. Masalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah.

2. Masalah ketidakstabilan ekonomi.

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami masa naik turun. Adakalanya kegiatan perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga.

3. Masalah pengangguran.

tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

4. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antar satu negara dengan negara-negara asing.

Adapun peran variabel tingkat inflasi dalam menerangkan perubahan atas penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah hanya sebesar 1,2%. Artinya, variabel tingkat inflasi hanya memiliki pengaruh sebesar 1,2% saja atas perubahan yang terjadi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, sisanya 98,8% adalah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial jika ada variabel-variabel lain yang diikutsertakan kedalam penelitian. Variabel tersebut bisa berasal dari pertumbuhan penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan Perkapita Regional. Selain informasi tersebut, informasi lain yang diperoleh berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didalam penelitian mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, adalah:

Setelah dilakukan pengujian regresi linier sederhana, didapatkan bahwa hasil $Y = 115,966 + 1,386X + 0,05$. Dimana nilai konstanta (a) sebesar 115,966 dan didapatkan koefisien regresi (b) sebesar 1,386 yang sama-sama bernilai positif. Artinya, jika variabel tingkat inflasi di Kota Bandung diabaikan, maka penerimaan pajak daerah di Kota Bandung akan tetap konstan sebesar 115,966,

dan jika variabel tingkat inflasi dinaikkan satu satuan, maka akan terjadi kenaikan sebesar 1,386 pada penerimaan pajak daerah di Kota Bandung satu satuan.

Setelah dilakukan pengujian korelasi pearson (least square) didapatkan output

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, maka berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat inflasi di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017 mengalami fluktuasi setiap tahunnya tergantung dengan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung dengan cara melakukan survey biaya hidup terhadap masyarakat Kota Bandung pada periode tersebut.
2. Penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017 juga cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan banyaknya kejadian yang telah dialami oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan kondisi ekonomi di Kota Bandung baik secara internal maupun eksternal. Salah satu diantaranya adalah pergantian kepemimpinan pada periode dimana penerimaan pajak daerah di Kota Bandung tidak tercapai, yaitu di tahun 2016 dan kondisi ekonomi di Kota Bandung yang belum bisa menyesuaikan dengan kenaikan target penerimaan pajak daerah.
3. Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, mengungkapkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017.

bahwa nilai dari korelasi pearson untuk tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah adalah 0,108 dan mempunyai korelasi hubungan yang sangat rendah karena berada di dalam rentang interval 0,00 – 0,199.

6. REFERENSI

Buku

- Ambarini, Lestari. 2017. *Ekonomi Moneter*. Bogor: In Media.
- Creswell, John W dan Achmad Fawaid, dkk (Penterjemah). 2017. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Nopirin, 2011. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2015. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto. 2015. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus dan Citra Pustaka.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.

Utari, G.A Diah. dkk. 2016. Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya. Jakarta: BI Institute.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Ferdiawan, Mohammad Andika. dkk. 2015. Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Penerimaan Pajak Penghasilan dalam Kurun Waktu 2005-2014). Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan. Vol.5 No.2 2015: Hal.4.

Indriyani, Siwi Nur. 2016. Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana. Vol.4 No.2 Mei 2016: Hal.2.

Mafaza, Wildah. dkk. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). Jurnal Perpajakan. Vol.11 No.1 2016: Hal.1.

Rafsanjani, Fachry Ali. dkk. 2015. Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran, dan Pendapatan Per Kapita Regional terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013). Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan. Vol.6 No.2 2015: Hal.1.

Website

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. 2018. Inflasi Jawa Barat Juni 2018 Sebesar 0,47 Persen. <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2018/07/02/270/inflasi-jawa-barat-juni-2018-sebesar-0-47-persen.html>. Diakses pada 26 Juli 2018.

_____. 2018. Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year) Gabungan 7

Kota di Jawa Barat 2008-2017. <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/07/263/inflasi-tahun-ke-tahun-year-on-year-gabungan-7-kota-di-jawa-barat-2008-2017.html>. Diakses pada 05 Agustus 2018.

Bank Indonesia. 2018. Pengenalan Inflasi. <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>. Diakses pada 26 Juli 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2018. Inflasi. <https://kbbi.web.id/inflasi>. Diakses pada 26 Juli 2018.

Widianto, Arif. 2017. Inflasi Indonesia 10 Tahun. <https://bolasalju.com/artikel/inflasi-indonesia-10-tahun/>. Diakses pada 26 Juli 2018.

Wikipedia.org. Diakses pada 26 Juli 2018. <https://bppd.bandung.go.id/>. Diakses tanggal 1 Oktober 2018.

<http://www.definisipengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>. Diakses tanggal 21 Oktober 2018.